

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literatur

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyajikan beberapa *literature review* yang digunakan sebagai pedoman penelitian. Adapun literatur yang pertama merupakan dokumen resmi yang dipublikasikan oleh Pemerintah Cina pada September 2016 dengan judul “*China’s National Plan on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development*”. Dokumen resmi ini diperuntukan sebagai panduan serta upaya memudahkan proses implementasi agenda pembangunan berkelanjutan 2030 lewat berbagai pertimbangan seperti (a) Pencapaian dan Pengalaman, (b) Peluang dan Tantangan, (c) Kerangka Pemikiran dan Prinsip Umum, (d) Pendekatan, (e) Rencana Implementasi. Dalam hal (a) Pencapaian dan Pengalaman dilihat berdasarkan tolak ukur masa periode MDG, “Pencapaian” yang meliputi pertumbuhan ekonomi; kemajuan sosial; kemajuan perlindungan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim; dan pembentukan kerjasama *South-South*, “Pengalaman” yang meliputi pengembangan menjadi prioritas utama; perumusan dan penerapan strategi pada pembangunan nasional jangka menengah dan panjang; liberalisasi pasar; pengaturan sistem hukum dan peraturan yang dapat memobilisasi masyarakat; pengadaan zona percontohan dan eksperimental secara bertahap; serta pengukuhan kerja sama internasional. Kemudian (b) Peluang dan Tantangan terdapat dalam dua tingkatan, yaitu internasional (agenda perdamaian dan pembangunan serta semakin rumitnya hubungan internasional) dan domestik (lingkungan politik yang stabil dan ekonomi

normal baru). Lebih lanjut pertimbangan (c) Kerangka Pemikiran dan Prinsip Umum terbagi menjadi, “Kerangka Pemikiran” yang meliputi pengembangan yang terkoordinasi; pengembangan inovasi; pengembangan hijau; pengembangan terbuka; pengembangan bersama, “Prinsip Umum” yang meliputi prinsip pembangunan damai; prinsip Kerja sama *win-win*; prinsip integrasi dan koordinasi; prinsip inklusifitas dan keterbukaan; prinsip kedaulatan dan tindakan sukarela; prinsip "tanggung jawab dan diferensiasi". Kemudian (d) Pendekatan dilakukan dengan sinergi strategi; jaminan kelembagaan; mobilisasi sosial; mobilisasi sumber daya; manajemen risiko; kerja sama internasional; pengawasan dan peninjauan. (e) Rencana Implementasi agenda pembangunan berkelanjutan 2030 terfokuskan pada usaha pengintegrasian 17 poin SDG.

Selain itu, dalam jurnal berjudul “*Mapping Alignment of the 13th FYP (2016-2020) with the SDG's (2016-2030)*” yang ditulis oleh Sen Gong, Bingqin Li, dan Qiu Shen membahas secara komprehensif terkait pemetaan agenda SDG yang terjadi di dalam FYP ke-13. Analisis pemetaan agenda SDG di dalam FYP ke-13 dilakukan dengan membandingkan poin-poin di dalam SDG, *China's position paper* / Rencana Nasional, dan FYP ke-13. Lewat perbandingan yang dilakukan, perbedaan dapat diamati pada tingkat target dan indikator, SDG memiliki 17 tujuan, 169 target dan 230 indikator sedangkan FYP ke-13 hanya berisikan 25 target yang terbagi ke dalam empat kategori. Kemudian ditemukan bahwa 50 indikator dalam SDG sepenuhnya telah tercakup ke dalam FYP ke-13, lalu 70 indikator hanya muncul sebagian, dan 119 indikator tidak sama sekali tercakup di dalam FYP ke-13. Jumlah target tertinggi antara SDG dan FYP ke-13 terjadi pada bidang

pengurangan kemiskinan, kesehatan, air bersih dan perlindungan kehidupan daratan. Sebaliknya, terjadi penurunan terhadap indikator bidang ketidaksetaraan, ketidaksetaraan gender, pekerjaan yang layak, perdamaian dan kerja sama yang kurang terwakili dalam FYP ke-13. Kemudian untuk menjamin ketercapaian target SDG yang terdapat di dalam FYP ke-13 maka dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu (a) Prioritas, di dalam rencana nasional Cina terurai poin-poin prioritas pemerintah yang berimplikasi pada pemusatan sumber daya untuk menyelesaikan masalah secara efisien; (b) Tanggung jawab, beberapa tujuan dan sifat sektoral SDG membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi antar-sektoral yang berkelanjutan; (c) Pembiayaan, implementasi SDG akan memerlukan permintaan sumber daya yang lebih besar; (d) Evaluasi kinerja, evaluasi rutin pelaksanaan SDG dilakukan di berbagai tingkatan administrasi publik dan oleh pemangku kepentingan yang berbeda.

Kemudian dalam jurnal berjudul *Geographical and Environmental Perspectives for The Sustainable Development of Renewable Energy in Urbanizing China* yang ditulis oleh Chao Bao dan Chuang-lin Fang, yang membahas disparitas spasial dan konsistensi perkembangan energi terbarukan Cina melihat pengembangan energi terbarukan Cina sebagai kunci pembangunan berkelanjutan dari sistem sosio-ekonomi dalam urbanisasi dan industrialisasi yang pesat. Namun, Cina juga menghadapi banyak tantangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dari energi terbarukan, seperti kendala teknis; ekonomi dan kebijakan; koordinasi spasial yang terintegrasi. Dampak lingkungan positif dan negatif dari energi terbarukan di Cina harus dipertimbangkan dengan cermat,

terlebih dampak lingkungan negatif. Oleh karena itu tuntutan pengembangan energi terbarukan Cina dapat ditinjau kembali lewat perspektif geografis dan lingkungan, seperti membangun basis produksi energi nasional sesuai dengan distribusi sumber daya; sumber listrik yang stabil dan tidak stabil harus diintegrasikan berdasarkan fitur alamnya dan konsistensi spasialnya; keseluruhan tata letak pembangunan sosio-ekonomi di Cina harus disesuaikan agar konsisten dengan perkembangan energi terbarukan.

Selanjutnya penulis juga mengkaji jurnal yang berjudul *Opportunities and Challenges for Renewable Energy Policy in China* yang ditulis oleh Zhang Peidong, Yang Yanli, Shi jin, Zheng Yonghong, Wang Lisheng & Li Xinrong. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Cina memiliki potensi energi terbarukan yang berlimpah. Energi terbarukan Cina diantaranya adalah energi matahari (solar), energi angin, energi biomassa, energi air bertenaga kecil yang merujuk pada kapasitas tenaga kurang dari 5.0×10^3 kW, dan energi laut yang mencakup energi pasang; energi ombak; dan lain-nya. Untuk mempromosikan dan memastikan pengembangan energi terbarukan pemerintah Cina telah merumuskan serangkaian kebijakan tentang pengembangan energi terbarukan. Kebijakan ini memainkan peran pendorong dan pemandu yang signifikan dalam pengembangan dan penggunaan energi terbarukan. Namun, kebijakan pengembangan energi terbarukan Cina mulai menunjukkan kekurangan tertentu, seperti: Pertama, kebijakan yang kurang koordinasi dan konsisten mengakibatkan fungsi kebijakan kurang koordinatif; Kedua, kebijakan penunjang dan sistem yang tidak memadai; Ketiga, kurangnya inovasi kebijakan daerah; Keempat, sistem investasi dan

pembiayaan tidak lengkap; Kelima, investasi Cina dalam penelitian teknis dan pengembangan energi terbarukan tidak memadai.

Lalu dalam jurnal yang ditulis oleh Michal Meidan, Philip Andrews-Speed & Ma Xin dengan judul *Shaping China's Energy Policy: actors and processes*. Di dalam jurnal ini para penulis menjelaskan bagaimana kebijakan energi di Cina terbentuk dengan mengidentifikasi aktor di belakang, pendorong, kendala dan kemajuan dalam reformasi sektor energi di Cina. Terdapat beberapa tahapan dalam perumusan kebijakan di Cina yaitu: pertama, representasi masalah dan pengaturan agenda; kedua, penerjemahan masalah yang dirasakan ke dalam prioritas yang disesuaikan dengan solusi yang diusulkan guna menghasilkan langkah-langkah kebijakan atau peraturan; dan ketiga, kebijakan akan menghadapi kendala tujuan dan kelembagaan dari sistem selama proses pengimplementasian.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Konsep Rezim Internasional

Berdasarkan definisi konsensus yang dikemukakan Stephen D. Krasner, rezim internasional merupakan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang bersifat implisit ataupun eksplisit di mana ekspektasi para aktor bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu. Terdapat empat unsur utama dalam pernyataan Krasner yang berkaitan erat dengan rezim yaitu prinsip, norma, aturan, dan prosedur. Prinsip adalah keyakinan akan fakta, penyebab, dan kejujuran; Norma adalah standar perilaku yang didefinisikan dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban; Aturan adalah ketentuan atau larangan khusus untuk

bertindak; Prosedur merupakan pengambilan keputusan dalam praktik yang berlaku untuk membentuk dan menerapkan pilihan kolektif. Kemudian menurut Robert O. Keohane, rezim dapat didefinisikan sebagai lembaga dengan aturan eksplisit yang disepakati oleh pemerintah yang berkaitan dengan serangkaian masalah tertentu di dalam hubungan internasional (Andreas Hasenclever, 1997, pp. 9–12).

2.2.2 Konsep Kebijakan

Menurut Carl J. Friedrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang. Sementara itu, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu, dan seorang pelaku baik individu maupun kelompok harus mengikuti dan melaksanakan tindakan tersebut guna memecahkan masalah tertentu. Dari beberapa penjelasan diatas, strategi memahami kebijakan mencakup beberapa poin penting, yaitu (1) Berisikan tujuan khusus yang ingin dicapai, tujuan dalam sebuah kebijakan tertentu hakikatnya didasarkan pada kepentingan umum atau kesejahteraan umum; (2) Merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, kebijakan senantiasa merupakan kumpulan tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan yang diterjemahkan ke dalam bentuk rencana dan proyek; (3) Masukan saran terkait tindakan dapat datang dari individu atau kelompok di dalam atau di luar pemerintah; (4) Input dalam kebijakan dapat berupa sumber daya manusia dan non-manusia yang diperuntukan untuk melaksanakan strategi kebijakan (LAN, 2015, pp. 9–12).

2.2.3 Konsep Pemangku Kepentingan

Menurut Mitchell et al, gagasan umum tentang siapa sebenarnya pemangku kepentingan dapat berupa personal, lembaga, kelompok, organisasi, inventaris, dan bahkan lingkungan. Selain itu, Freeman dan Reed menjabarkan pemangku kepentingan sebagai individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian atau dipengaruhi oleh tujuan organisasi (Benn, Abratt, & O’Leary, 2016, pp. 1–2). Pemangku kepentingan adalah orang, kelompok atau lembaga yang memiliki kepentingan dalam suatu proyek atau program (ODA, 1995, p. 2). Pemangku kepentingan menurut Bryson dapat didefinisikan ke dalam dua bentuk, bentuk pertama mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masa depan organisasi, yang berarti individu atau organisasi tanpa kekuasaan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemangku kepentingan. Bentuk definisi lainnya merupakan pengakuan bagi individu atau kelompok yang memiliki dimensi moral yang jelas. Demikian pula, Kaler membedakan dua jenis definisi pemangku kepentingan, yaitu definisi pemangku kepentingan sebagai "penggugat" dan pemangku kepentingan yang didefinisikan sebagai "pemberi pengaruh" (Mathur, Price, Austin, & Moobela, 2007, p. 4).

2.2.4 Energi Terbarukan

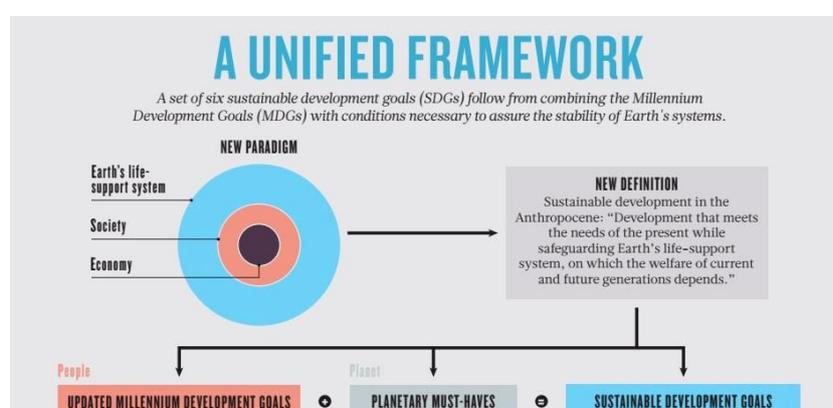
Energi terbarukan sering kali disebut sebagai “energi hijau” atau “energi bersih”. Energi terbarukan berasal dari sumber atau proses alami yang terus-menerus terisi kembali. Energi terbarukan merupakan cara untuk menghasilkan energi dari sumber daya alam yang secara teoritis tidak terbatas. Sumber daya ini

tersedia tanpa batas waktu atau terisi kembali lebih cepat daripada tingkat pemakaiannya. Penggunaan istilah “energi terbarukan” berasal dari spektrum sumber daya yang luas, yang didasarkan kepada sumber energi yang dapat diperbarui seperti sinar matahari, angin, air yang mengalir, dan lain-lain (Bull, 2001, p. 1216). Sumber energi terbarukan yang dapat memenuhi kebutuhan energi domestik berpotensi menyediakan energi dengan emisi polutan udara dan gas rumah kaca yang relatif kecil atau hampir tidak ada. Konsumsi daya energi terbarukan sebagai pemenuhan kebutuhan energi telah meningkat selama setahun terakhir. Energi terbarukan telah menyediakan 8% listrik dunia pada tahun 2017 dan sekarang mencakup 1/3 dari Eropa, 1/4 dari Cina dan 1/6 dari Amerika Serikat, India, dan Jepang.

2.2.5 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs), mulai diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. SDGs dianggap sebagai seruan universal untuk bertindak dalam mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, serta memastikan bahwa semua orang dapat menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Pada tingkat yang lebih luas, SDGs merupakan contoh kebijakan yang bersumber dari inisiatif kebijakan sebelumnya, yaitu *Milenium Development Goals (MDGs)*. MDGs telah menjadi penanda metode bersejarah yang efektif dari mobilisasi global untuk mencapai serangkaian prioritas sosial yang penting. MDGs mengulas permasalahan publik yang luas tentang kemiskinan, kelaparan, penyakit, pendidikan yang tidak terpenuhi, ketidaksetaraan gender, dan degradasi lingkungan. Dengan mengemas prioritas ini ke dalam satu

set yang berisikan delapan tujuan yang mudah dimengerti, dengan menetapkan tujuan yang terukur dan terikat waktu, MDGs membantu mempromosikan kesadaran global, akuntabilitas politik, umpan balik sosial, dan tekanan publik. Kemungkinan kekurangan pencapaian MDGs terdapat pada kemampuan beberapa negara untuk dapat mencapai semua atau sebagian besar MDGs, sedangkan negara lain akan mendapatkan pencapaian yang sangat sedikit. Kekurangan tersebut merupakan serangkaian kegagalan operasional yang melibatkan banyak peran para pemegang kepentingan, baik di negara miskin maupun kaya. Janji bantuan pembangunan resmi oleh negara kaya, misalnya, yang hingga saat ini belum terwujud (Sachs, 2012). Karena alasan ini, pemerintah dunia tampaknya siap untuk mengadopsi tahapan yang baru bagi tujuan global mengikuti periode 15 tahun MDG. Panel keberlanjutan global tingkat tinggi, menjelang KTT Rio + 20 pada Juni 2012, telah mengeluarkan laporan yang merekomendasikan agar dunia mengadopsi seperangkat SDGs



Gambar 2. 1
A Unified Framework

Sumber: Griggs, *Sustainable development goals for people and planet*

SDGs akan diintegrasikan ke dalam tindak lanjut MDGs setelah batas waktu 2015. Dalam SDGs perlindungan sistem pendukung kehidupan Bumi dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas ganda (Griggs, 2013). Fungsi sistem bumi yang stabil seperti atmosfer, lautan, hutan, saluran air, keanekaragaman hayati, dan siklus biogeokimia merupakan prasyarat bagi masyarakat global yang berkembang pesat. Untuk menjamin kedua prioritas tersebut SDGs dilengkapi dengan 17 tujuan yang terintegrasi, dengan kata lain setiap tindakan di satu bidang akan mempengaruhi hasil pada bidang lain. Ke-17 tujuan ini berkaitan langsung dengan permasalahan sosial, ekologi, dan ekonomi yang difungsikan sebagai panduan utama untuk transisi menuju pembangunan berkelanjutan (J., Bebbington & J., Unerman, 2017).

2.2.5.1 SDG7

Kurangnya akses pada suplai energi serta sistem transformasi merupakan kendala bagi pembangunan manusia dan ekonomi. Untuk menyediakan alternatif

baru terkait suplai energi, SDG membentuk tujuan khusus terkait dengan energi yaitu SDG7. Kehadiran SDG7 memberikan tujuan universal tentang energi yang berfokus target pada akses, efisiensi, energi terbarukan, dan sarana implementasinya. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk seluruh orang sangat penting untuk mencapai SDGs sebagai bagian dari pemberantasan kelaparan dan kemiskinan melalui kemajuan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, pertumbuhan inklusif, kota berkelanjutan, pasokan air, infrastruktur, industrialisasi, dan lainnya (“NewSDG7 - UN - Energy,” 2020).

2.2.6 Rencana Lima Tahun Cina (*China Five-Year Plan*)

Rencana Lima Tahun adalah serangkaian inisiatif pembangunan sosial dan ekonomi yang dikeluarkan sejak tahun 1953 di Republik Rakyat Cina. Sejak 1949, Partai Komunis Cina telah membentuk perekonomian negara melalui sesi paripurna Komite Sentral dan kongres nasional. Partai memainkan peran utama dalam membangun dasar dan prinsip komunisme Cina, menetapkan strategi untuk pembangunan ekonomi, menetapkan target pertumbuhan, dan mendorong reformasi. Namun dalam era ekonomi terencana, pembentukan Komisi Perencanaan Negara menjadi kunci dalam menyusun rencana lima tahunan. Badan ini mengalami beberapa transformasi saat Cina bergerak menuju ekonomi pasar pada 1980-an menjadi *National Development and Reform Commission* (NDRC) pada 2003 (Arranz, 2020).

2.2.6.1 Rencana Lima Tahun Ke-13 (2016-2020)

Cina mengadopsi Rencana Lima Tahun ke-13 pada 15 Maret 2016. Rencana tersebut menguraikan tujuan, prinsip dan target Cina untuk perkembangannya hingga tahun 2020. Hal Ini merupakan Rencana Lima Tahun pertama yang dikembangkan di bawah kepemimpinan Xi Jinping dan yang pertama sejak ekonomi Cina memasuki laju pertumbuhan ekonomi "normal baru". Dengan latar belakang ini, rencana tersebut menetapkan target pertumbuhan PDB tahunan sebesar 6,5% selama 5 tahun ke depan, yang mencerminkan tujuan jangka panjang Partai Komunis Cina untuk menggandakan PDB negara dan pendapatan rumah tangga dalam dekade dari 2010 hingga 2020 ("KWM | China's 13th Five Year Plan: the land of opportunity," 2016).



Gambar 2. 2
China's New Five Year Plan

Sumber: King & Wood Mallesons - Cina's 13th Five Year Plan: the land of opportunity

- Kesehatan dan Perawatan Lansia - Mempromosikan gagasan "Cina yang Sehat", mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembentukan sistem perawatan kesehatan dan lansia yang terintegrasi.
- Layanan Keuangan - Rincian Rencana langkah-langkah untuk mengatasi tujuan ganda dari reformasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan.
- Pertanian - Penegasan kembali restrukturisasi sektor pertanian Cina dan memperkenalkan inovasi teknologi yang lebih baik dan sistem layanan sosialisasi pertanian yang efektif.
- Infrastruktur – Harmonisasi strategi “*One Belt, One Road*” Cina, urbanisasi dan investasi infrastruktur yang menjadi prioritas tinggi lewat rencana untuk mengoordinasikan pembangunan regional serta infrastruktur jalan, kereta api, dan pelabuhan untuk menyatukan negara. Rencana tersebut juga menyoroti fokus yang kuat pada infrastruktur inovatif dan pembangunan hijau.
- Lingkungan - Penekanan ekonomi yang lebih bersih dan lebih hijau, dengan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan, pengendalian energi dan emisi yang bersih, perlindungan dan keamanan ekologis, serta pengembangan industri hijau.
- Inovasi, Internet Plus, media baru dan teknologi informasi - mendorong integrasi internet dengan sektor ekonomi tradisional dan mempromosikan inovasi berbasis Internet.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritis yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Dengan adanya strategi kebijakan FYP ke-13 di bidang energi terbarukan, maka energi terbarukan di Cina telah tercapai dengan terpenuhinya indikator capaian yang sudah ditetapkan dalam SDG7”

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Dengan adanya strategi kebijakan FYP ke-13 di bidang energi terbarukan	<ol style="list-style-type: none">1. Target di dalam FYP ke-13 terkait energi2. Faktor pendorong pembentukan kebijakan energi terbarukan3. Pengaturan rencana pengembangan energi terbarukan	<ol style="list-style-type: none">1. Artikel “<i>China 13th Renewable Energy Development Five Year Plan (2016-2020)</i>” dalam IEA/IRENA <i>Renewables Policies Database</i>2. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal di dalam perumusan kebijakan energi terbarukan dalam FYP ke-133. Dokumen rencana pengembangan energi terbarukan FYP ke-13
Variabel Terikat: Maka energi terbarukan di Cina telah tercapai dengan terpenuhinya indikator capaian yang sudah ditetapkan dalam SDG7	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator target 7.2 mengenai energi terbarukan2. Peningkatan produksi dan kapasitas energi terbarukan	<ol style="list-style-type: none">1. Data pangsa energi terbarukan dalam total konsumsi energi akhir2. Data pangsa produksi dan kapasitas energi terbarukan

2.5 Skema dan Alur Penelitian

